

**KEBIJAKAN PEMERINTAH VIETNAM TERHADAP IMPLEMENTASI  
*BELT AND ROAD INITIATIVE* TIONGKOK DI ASIA TENGGARA**



**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Pada Jurusan  
Ilmu Hubungan Internasional*

Oleh:

**KIRENIUS**

**E061191013**

**Departemen Ilmu Hubungan Internasional**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Universitas Hasanuddin**

**2024**



**Halaman Judul**

**KEBIJAKAN PEMERINTAH VIETNAM TERHADAP IMPLEMENTASI  
*BELT AND ROAD INITIATIVE* TIONGKOK DI ASIA TENGGARA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Pada  
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional**

**Oleh:**

**KIRENIUS**

**E061191013**

**Departemen Ilmu Hubungan Internasional**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Universitas Hasanuddin**

**2024**



## HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : KEBIJAKAN PEMERINTAH VIETNAM TERHADAP  
IMPLEMENTASI *BELT AND ROAD INITIATIVE* TIONGGOK DI  
ASIA TENGGARA

N A M A : KIRENIUS

N I M : E061191013

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 25 Juni 2024



Mengetahui :

Pembimbing I,

Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si  
NIP. 196304241991031002

Pembimbing II,

Agussalim, S.IP, MIRAP  
NIP. 19760818205011003

Mengesahkan :

Plt. Ketua Departemen Hubungan Internasional,

Prof. Dr. Phil. Sukri, S.IP, M.Si  
NIP. 197508182008011008



EN HUBUNGAN INTERNASIONAL FISIP UNHAS

## HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : KEBIJAKAN PEMERINTAH VIETNAM TERHADAP  
IMPLEMENTASI *BELT AND ROAD INITIATIVE* TIONGKOK DI  
ASIA TENGGARA

N A M A : KIRENIUS

N I M : E061191013

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Jum'at, 21 Juni 2024.



Ketua : Agussalim, S.IP, MIRAP

Sekretaris : Atika Puspita Marzaman, S.IP, MA

Anggota : 1.M. Imran Hanafi, MA, M.Ec

2. Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si

3. Ishaq Rahman, S.IP, M.Si



ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FISIP UNHAS

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

---

Sebagai sivitas akademika Universitas Hasanuddin, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kirenius  
NIM : E061191013  
Jenjang : S1 Ilmu Hubungan Internasional  
Departemen : Ilmu Hubungan Internasional  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jenis Karya : Skripsi

Menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan adalah hasil karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan. Referensi untuk semua kutipan langsung maupun tidak langsung sudah dicantumkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Makassar, 27 Juni 2024



(Kirenius)



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis dipanjatkan kepada Tuhan yang maha kuasa karena atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Setelah melalui banyak dinamika dan proses dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis juga pada akhirnya bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Vietnam Terhadap Implementasi Belt and Road Initiative Tiongkok di Asia Tenggara” juga menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi penulis untuk menyelesaikan studi strata satu di Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Dimulai sejak tahun 2023, pada saat penyusunan proposal skripsi hingga selesainya skripsi ini yang mempunyai banyak warna dan dinamika dalam penyusunannya yang sepenuhnya diluar dari dugaan yang mulanya penulis rencanakan. Saat proses penelitian berlangsung, penulis menyadari bahwa akan ada kemungkinan bahwa terjadi kekurangan baik dari segi penyajian dan data pendukung, serta kongruensi antara kerangka konsep dengan analisis pada pembahasan. Mengingat kekurangan-



an dan hambatan dalam penyusunan skripsi ini, inkonruensi dapat saja n dalam analisis data dan konsep yang penulis gunakan namun meskipun

demikian penulis telah melakukan upaya maksimal untuk mereduksi semua kemungkinan tersebut.

Harapan penulis agar skripsi ini dapat memberikan kontribusi dalam diskursus Hubungan Internasional Khususnya sebagai tambahan referensi terkait implementasi belt and road initiative Tiongkok di Asia tenggara yang jika dilihat lagi bahwa kekurangan-kekurangan baik dari segi struktur, substansi, maupun cara penulis mengelaborasi isi skripsi ini. Mengingat bahwa krusialnya ilmu pengetahuan dikembangkan penulis dengan senang hati terbuka akan segala bentuk kritik dan saran maupun segala bentuk diskusi terkait substansi materi dalam skripsi ini, dengan hak tersebut juga penulis akan terus belajar dan mengembangkan diri agar skripsi ini tidak menjadi titik akhir dalam pencarian ilmu pengetahuan penulis. Seluruh rangkaian proses penyusunan skripsi ini menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk terus menorehkan karya yang lebih komprehensif di masa yang akan datang.

Sebagai penutup dari kata pengantar ini, penulis berkenan menyampaikan terima kasih kepada segenap pihak-pihak yang turut berkontribusi selama proses penyusunan skripsi ini, serta selama penulis menjadi salah satu mahasiswa di jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin :

1. Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya



kepada Tuhan yang Maha kuasa, yang telah memberikan Rahmat dan hikmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tanpa

pertolongan-Nya, penulis tidak akan mampu menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.

2. Terimakasih kepada keluarga penulis yang selalu memberikan dukungan, doa, dan semangat selama proses perkuliahan hingga selesainya tugas akhir ini. Penulis tidak akan mampu menyelesaikan tugas akhir ini tanpa dukungan dari keluarga penulis.
3. Bapak Prof. Drs. H. Darwis, MA., Ph.D selaku ketua departemen hubungan internasional, Bapak Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si yang menjadi pembimbing I saya dan Bapak Agussalim, S.IP, MIRAP selaku pembimbing II saya yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaga tak lupa pula ilmu yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Segenap dosen ilmu hubungan internasional FISIP Universitas Hasanuddin atas dedikasinya menyalurkan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penulis hingga akhir studi.
5. Terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu namun telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Rincian ucapan terimakasih yang penulis sampaikan tidak mampu menjangkau rasa syukur dan terimakasih yang penulis rasakan selama menempuh studi S1 di Prodi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Penulis sepenuhnya menyadari bahwa setiap





momen yang tercipta, kisah yang terukir, hingga setiap individu yang ditemui oleh penulis dalam tiap langkah dan ayunan tangan perjalanan penulis memiliki makna yang tak mampu dideskripsikan secara holistik. Terakhir yang paling krusial, skripsi ini penulis mempersembahkan kepada kedua orang tua, Bapak Tertius Enajalla dan Ibu Adolfina yang telah mendedikasikan jerih payahnya baik materil, moral dan doanya kepada penulis. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat sebagaimana harapan penulis. Terimakasih

Makassar, 20 Januari 2024

Kirenius



## ABSTRAK

**Kirenius, E061191013, “Kebijakan Pemerintah Vietnam Terhadap Implementasi Belt And Road Initiative Tiongkok di Asia Tenggara”** di bawah Drs. Munjin Syafik Asy’ari, M.Si yang menjadi pembimbing I dan Bapak Agussalim, S.IP, MIRAP selaku pembimbing II pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah Vietnam terhadap implementasi Belt And Road Initiative Tiongkok di Asia Tenggara dengan konsep dan teori Foreign Policy dan National Interest. Metode penelitian ini menggunakan analisis kualitatif-deskriptif.

Pada tahun 2013, Presiden Tiongkok dan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok Xi Jinping meresmikan Belt and Road Initiative (BRI), proyek kebijakan ekonomi dan luar negeri khususnya yang dirancang untuk membiayai dan membangun infrastruktur dan konektivitas di seluruh dunia, dengan fokus pada Eurasia dan wilayah Indo-Pasifik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Vietnam secara terbuka menerima BRI namun tetap berhati-hati. Dalam upaya Tiongkok menyebarkan pengaruhnya maka ada lima program pokok dari Belt And Road Initiative yang salah satunya adalah *Undersanding Beetween People* yang berfokus kepada pertukaran pendidikan, budaya, dan kesehatan.

Vietnam telah melakukan diversifikasi dan multilateralisasi kebijakan luar negerinya untuk menjalin hubungan baik dengan semua negara dan organisasi internasional. Hubungan bilateral dan multilateral ini telah berkontribusi dalam menciptakan kondisi internasional yang menguntungkan untuk pembangunan ekonomi serta mengurangi pengaruh dari tetangga Utara. Pemerintah Vietnam mengadopsi nilai yang mengatakan Jika kami ingin menjinakkan Tiongkok, maka kami harus menunjukkan kepada Tiongkok bahwa kami memiliki banyak teman.

Kata kunci : *Belt And Road Initiative, Tiongkok, Vietnam, Hegging*



## ABSTRACT

**Kirenius, E061191013, “Vietnam Government Policy Towards the Implementation of Tiongkok’s Belt And Road Initiative in Southeast Asia”** under Drs. Munjin Syafik Asy’ari, M.Si who became the first supervisor and Mr. Agussalim, S.IP, MIRAP as the second supervisor at the Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University. This study aims to analyze the Vietnamese government’s policy towards the implementation of the Tiongkok Belt And Road Initiative in Southeast Asia with the concepts and theories of Foreign Policy and National Interest. This research method uses qualitative-descriptive analysis.

*In 2013, Chinese President and General Secretary of the Chinese Communist Party Xi Jinping inaugurated the Belt and Road Initiative (BRI), his signature economic and foreign policy project designed to finance and build infrastructure and connectivity around the world, with a focus on Eurasia and the Indo-Pacific region. The results of this study show that the Vietnamese government openly accepts the BRI but remains cautious. In Tiongkok’s efforts to spread its influence, there are five main programs of the Belt and Road Initiative, one of which is Understanding Between People, which focuses on educational, cultural and health exchanges.*

*Vietnam has diversified and multilateralized its foreign policy to establish good relations with all countries and international organizations. These bilateral and multilateral relations have contributed to creating favorable international conditions for economic development as well as reducing the influence of the Northern neighbor. The Vietnamese government adopted the value that if we want to tame Tiongkok, then we must show Tiongkok that we have many friends.*

**Keywords:** *Belt And Road Initiative, Tiongkok, Vietnam, Heggin*



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR BAGAN.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Kerangka Konseptual.....	7
a. Kebijakan Luar Negeri ( <i>Foreign Policy</i> ).....	7
b. Kepentingan Nasional ( <i>National Interest</i> ).....	10
E. METODE PENELITIAN.....	13
a. Tipe Penelitian.....	13
b. Tehnik Pengumpulan Data.....	14
c. Tehnik Analisis Data.....	14
d. Metode Penulisan.....	14
BAB II	
TINJAUAN	
PUSTAKA.....	15
A. Kebijakan Luar Negeri ( <i>Foreign Policy</i> ).....	15
B. Kepentingan Luar Negeri ( <i>National Interest</i> ).....	25
C. Penelitian Terkait.....	35
BAB III	
RAN	
.....	37
jarah Belt and Road Initiative Tiongkok.....	37
wal Kerjasama Vietnam dan Tiongkok.....	46



PEMBAHASAN.....	51
A. Implementasi Belt and Road Initiative Tiongkok di Asia Tenggara.....	51
B. Kebijakan Pemerintah Vietnam Terhadap Implementasi Belt and Road Initiative Tiongkok di Asia Tenggara.....	60
BAB V	
PENUTUP.....	79
A. KESIMPULAN.....	79
B. SARAN.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	81

## DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Skema Perumusan Kebijakan Luar Negeri.....	22
--	----



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta jalur Belt And Road Initiative Tiongkok.....	39
--	----





Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

# BAB I PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Kita mengenal Tiongkok sebagai peradaban besar dan tertua di dunia. Banyak orang mengetahui bahwa Tiongkok dari dulu sudah memberikan berbagai macam penemuan yang sangat penting bagi dunia seperti penemuan mesiu, kompas dan juga penemuan kertas (Yuliantoro, 2021). Kesuksesan pemerintah Tiongkok dalam pembangunan negaranya menjadi maju, tidak terlepas dari pengaruh negosiasi dan diplomatik yang baik dalam menjalin hubungan dengan negara lain. Ada salah satu pandangan yang digunakan Tiongkok dalam hal perilaku hubungan internasionalnya, yaitu pandangan konfusius. Karya-karya Konfusius secara signifikan mempengaruhi pemikiran dan perilaku orang Tionghoa. Pandangan konfusius tentang perilaku strategis Tiongkok adalah bahwa Tiongkok secara umum menunjukkan keengganan untuk menggunakan kekuatan atau kekerasan, bahkan di bawah ancaman keamanan. Negosiasi dan diplomatiklah yang lebih diutamakan dan di usulkan sebagai preferensi yang utama (Feng, 2007). Salah satu contoh kebijakan pemerintah Tiongkok dalam membangun hubungan dengan dunia internasional adalah kebijakan *Belt And Road Initiative* nya.

Tiongkok menunjukkan taringnya sebagai salah satu negara terkuat di dunia dengan diterbitkannya kebijakan yang digadang-gadang sebagai strategi untuk menyaingi kekuatan Amerika Serikat. *Belt and Road Initiative* (BRI) atau juga dengan *One Belt One Road* (OBOR) merupakan kebijakan luar





negeri dan ekonomi negara Tiongkok yang mempunyai beberapa penafsiran. Ada yang menafsirkan bahwa BRI adalah visi geo-ekonomi yang sangat ambisius, dimana 70 negara dapat menjadi cakupannya dan juga dapat mencakup dua pertiga populasi dunia. Ada juga yang mengartikan BRI adalah kebijakan luar negeri dari presiden Xi Jinping untuk meningkatkan hubungan regional pada lintas benua.

BRI pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Xi Jinping ketika mengunjungi Kazakhstan pada 7 September 2013. Dalam pidatonya di Universitas Nazarbayev, Presiden Xi mengusulkan agar Tiongkok dan negara-negara Eurasia melakukan proyek bersama yang disebut dengan Sabuk Ekonomi Jalur Sutra. Dari kebijakan kerja sama ini, banyak negara yang mejadi mitra dari Tiongkok (Cai, 2017).

BRI Tiongkok ini merupakan proyek strategis pembangunan yang terdiri dari jalur laut dan koridor darat. Kepemimpinan ekonomi dan pengaruh politik Beijing atas wilayah tetangga dapat menerima sejumlah manfaat melalui inisiatif pembangunan BRI bersama. BRI mengidentifikasi lima pilar yang saling berhubungan termasuk memperkuat komunikasi kebijakan, meningkatkan interkoneksi infrastruktur, mempromosikan fasilitasi perdagangan, meningkatkan sirkulasi moneter, dan memperkuat keterikatan antar warga (Understanding Between People). Tiongkok sangat ingin memainkan peran yang berkembang di platform global dan negara tersebut bersedia tabiskan dana yang sangat besar untuk mencapai tujuan tersebut (2018).



Asia Tenggara yang menjadi jalur dari proyek ambisius Tiongkok ini sangatlah penting untuk memastikan penyangga yang aman dan juga terkendali di sepanjang perbatasannya. Singapura, Vietnam, Thailand, Malaysia, Kamboja dan Myanmar, semuanya berada di peringkat sepuluh besar yang paling terhubung ke Tiongkok melalui perdagangan (Yan, 2018). Dilihat dari sejarahnya, Asia Tenggara memang sudah menjalin hubungan dengan Tiongkok sejak lama dan telah mendapatkan pencapaian yang sangat besar dalam kerja sama perdagangan, ekonomi, dan investasi.

Pada abad ke 19, kekuasaan di kawasan Asia Tenggara sempat bergeser ke negara-negara Eropa. Tiongkok berhasil mengambil kembali posisinya pada akhir tahun 1970. Pemulihan hubungan Tiongkok-Asia Tenggara dilakukan pada awal tahun 1990-an. Akhirnya, pada awal tahun 2000-an Tiongkok dan semua negara di Asia Tenggara menyepakati dasar untuk kerja sama dan konsolidasi jangka panjang di kawasan tersebut (Maxim,2020).

Tiongkok sebagai raksasa Asia yang bangkit begitu cepatnya, dengan jumlah penduduk yang hampir seperlima penduduk dunia, pertumbuhan ekonominyalah yang menjadi pendorong dibalik rekonfigurasi geopolitik yang sedang dijalankannya. ASEAN yang berdiri pada tahun 1967 merupakan wilayah yang terkena dampak dari kebangkitan Tiongkok. Kawasan Asia Tenggara digunakan sebagai akses energi dan juga sumber daya alam. Selain itu, wilayah ini menjadi saluran Tiongkok yang dianggap potensial untuk romosikan pengaruh diplomatiknya (Cai, 2017).



Negara-negara dan masyarakat Asia Tenggara secara tradisional membentuk bagian penting dari pandangan perdagangan, budaya dan demografi Tiongkok. Adapun motivasi atau pendorong Tiongkok dalam melakukan hubungan dengan Asia Tenggara adalah untuk memajukan kepentingan ekonomi, politik, dan strategis nasionalnya (Vinichai, 2020)

Hubungan Tiongkok dan ASEAN saat ini dapat dikatakan sangatlah luar biasa. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan yang berkontribusi pada harmoni perdamaian, stabilitas kemakmuran kawasan dengan tujuan meminimalkan potensi konflik atas sengketa wilayah yang selama ini belum mencapai titik temu salah satunya adalah dengan Vietnam.

Vietnam sebagai salah satu negara di Asia Tenggara memiliki posisi yang sangat strategis karena terletak di pusat ASEAN. Dari pandangan ekonomi, Vietnam dianggap sebagai salah satu pasar paling dinamis. Namun, berbicara mengenai hubungan Tiongkok dan Vietnam, tidak terlepas dari konflik laut Tiongkok Selatan yang sudah menjadi topik kontroversial.

Dari kekuatan persenjataan kedua negara terdapat perbedaan yang sangat besar khususnya dalam angkatan lautnya. Ketegangan yang alot antara kedua negara ini, menempatkan Vietnam pada posisi yang sangat rumit dan kompleks. Sampai saat ini penanganan konflik tersebut belum menunjukkan titik terang yang nyata.

Walaupun masih berkonflik di Laut Tiongkok Selatan, Tiongkok dan Vietnam telah mempertahankan hubungan kolaboratif dalam waktu yang sudah lama. Sistem politik yang sebanding mendorong Tiongkok dan Vietnam



membangun sistem ekonomi berkelanjutan. Membangun hubungan yang baik antara kedua negara tersebut didorong oleh keadaan ekonomi dalam negeri masing-masing. Inilah satu faktor yang menjadi kunci untuk meningkatkan hubungan yang lebih baik antara Tiongkok dan Vietnam adalah ekonomi, tentu saja dengan peningkatan perdagangan dan investasi yang dituangkan Tiongkok dalam proyek ambisiusnya, yakni BRI. Namun, disamping peluang yang diterima Vietnam dari program *Belt And Road Initiative* (BRI), dikatakan juga dapat memberikan dampak yang sangat serius terhadap kerangka hukum internasional yang ada, terkait dengan perselisihan komersial dan politik. Selain itu, program BRI Tiongkok ini juga berdampak pada kebijakan luar negeri (Vinichhai, 2020). Akhirnya, banyak negara-negara Asia Tenggara, termasuk Vietnam, menjadi dilema dalam menghadapinya.

Dengan adanya program ambisius Tiongkok, bisa saja akan memberi dampak negatif yang lebih besar bagi Vietnam dibandingkan dampak positifnya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini mencoba untuk meneliti berbagai kebijakan Vietnam yang berkaitan dengan proyek ambisius tersebut. Lebih spesifiknya, dalam penelitian ini akan membahas hubungan bilateral antara Vietnam dan Tiongkok. Hal inilah yang akan di analisis penulis dalam penelitian yang berjudul “KEBIJAKAN PEMERINTAH VIETNAM TERHADAP IMPLEMENTASI BELT AND ROAD INITIATIVE TIONGKOK DI ASIA TENGGARA”.



## **B. RUMUSAN MASALAH**

Penelitian ini berfokus pada kebijakan pemerintah Vietnam terhadap implementasi Belt And Road Initiative (BRI) Tiongkok di Asia Tenggara yang berfokus kepada hubungan antara Tiongkok dan Vietnam dimana salah satu tujuan dari BRI adalah Understanding Between People atau People to People Bond. peneliti ingin melihat apakah program Tiongkok ini juga menjadi salah satu yang dimasukkan ke dalam kerangka kerja sama dengan Vietnam. Berdasarkan latar belakang yang telah didapatkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana bentuk implementasi Belt And Road Initiative (BRI) Tiongkok di Asia Tenggara?
2. Bagaimana kebijakan pemerintah Vietnam terhadap implementasi Belt And Road Initiative (BRI) Tiongkok di Asia Tenggara?

## **C . TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini, yakni:

- a. Untuk mengetahui bagaimana bentuk implementasi Belt And Road Initiative (BRI) Tiongkok di Asia Tenggara.
- b. Untuk mengetahui bagaimana respon kebijakan pemerintah Vietnam terhadap implementasi Belt And Road Initiative (BRI) Tiongkok di Asia Tenggara.



Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap perkembangan studi Hubungan Internasional di masa yang akan datang.
- b. Dalam penelitian ini diharapkan juga bisa menjadi bahan referensi bagi mahasiswa Hubungan Internasional, maupun mahasiswa di bagian keilmuan lainnya yang memiliki ketertarikan terhadap kebijakan Pemerintah Vietnam terhadap implementasi Belt And Road Initiative (BRI) Tiongkok.

#### D. KERANGKA KONSEPTUAL

##### a. Kebijakan Luar Negeri (*Foreign Policy*)

Dewasa ini kapasitas kekuatan negara tidak hanya terbatas pada militernya saja, tetapi menyangkut pula tentang bagaimana demografi hingga kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, negara dengan kapasitasnya mampu membangun ataupun menjaganya. Mengapa demikian, karena negara-negara sebagai aktor dalam melakukan hubungan internasional sangat erat kaitannya dengan kebijakan yang akan diputuskan.

Selain itu, negara ada karena mempunyai kedaulatan. Pandangan Kaum liberal sama dengan kaum realis tentang karakteristik negara, sejauh mereka menerima bahwa ciri utama negara itu adalah kedaulatan (Puttiferd,2009). Oleh karena itu, suatu kehormatan negara ada pada aulatannya yang secara penuh dipegang tanpa adanya campur tangan dari ak luar. Suatu kebijakan sangatlah penting untuk diperhatikan karena



sangat besar pengaruhnya akan dampak yang bisa saja mengganggu kedaulatan negara.

Kebijakan luar negeri merupakan suatu konsep yang sampai kini masih relevan di kalangan penstudi ilmu hubungan internasional. Suatu negara akan membuat kebijakan luar negeri berdasarkan dengan kepentingan nasional. Kepentingan nasional ini hadir dengan sangat krusial jika berurusan dengan pembuatan suatu kebijakan, karena suatu kebijakan tercipta dari analisis kebutuhan yang harus dipenuhi untuk suatu negara (Saeri, 2012). Kepentingan nasional merupakan rumusan dan akumulasi kebutuhan umum suatu negara yang mencerminkan pilihan rasional dari suatu negara sehingga ada sebuah kebijakan.

Kebijakan luar negeri terdiri dari tujuan-tujuan dan tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk memandu keputusan tindakan pemerintah menyangkut urusan-urusan eksternal, terutama hubungan antar negara. Para pejabat administrasi yang memiliki posisi penting merupakan kunci pembuatan kebijakan luar negeri.

Konsep ini juga sebagai salah satu studi di Ilmu Hubungan Internasional dan diplomasi pada pertengahan abad ke 20-an, dan kemudian dikembangkan menjadi sebuah kerangka dengan tujuan untuk menganalisis sebuah kebijakan. Pencapaian sebuah kebijakan luar negeri merupakan suatu motif yang sangat mewarnai adanya hubungan internasional (Bakry,2017).

iap kebijakan yang lahir merupakan buah hasil pertimbangan rasional didasarkan analisis kemampuan dan kebutuhan negara tersebut. Motivasi



suatu negara dalam menjalankan kebijakannya adalah tujuan dari kebijakan itu sendiri, yaitu kepentingan nasional yang berada dibalik kebijakan luar negeri tersebut.

Dalam beberapa proses pembuatan kebijakan ada faktor yang mempengaruhi keluarnya kebijakan tersebut, yaitu faktor eksternal dan internal (Margaret,2010). Faktor eksternal, kebijakan luar negeri dapat dilihat dari negara-negara terletak di dalam sistem internasional dan dapat membatasi garis prilaku negara lain. Faktor internal, kebijakan luar negeri terdiri dari beberapa aspek. Pertama, institusi pemerintah mewakili seperangkat aktor dan kondisi domestik, bahkan kelompok masyarakat tertentu yang yang dapat terorganisir dan mempengaruhi pengambilan keputusan kebijakan luar negeri. Selain itu, berbagai aktor seperti aktor non negara ikut dalam mempengaruhi arah kebijakan luar negeri (Hadiwinata, 2017).

Penggunaan konsep ini dalam pra-teori kebijakan luar negeri James Rosenou dia mengidentifikasi sejumlah kemungkinan sumber yang relevan mengenai kebijakan luar negeri dan mengelompokkannya menjadi lima kategori yang disebut variable idiosentrik, variable peran, variable administrasi, variable sosial, dan variable sistemik (Robert Jacson,2016).

Dalam hal ini pendekatan pembuatan keputusan (decision making approach) digunakan melalui analisis proses pengambilan kebijakan administrasi pemerintah Vietnam yang mewakili negara dalam menentukan kebijakan yang tentu akan melihat berbagai faktor, seperti yang sudah





dijelaskan diatas bahwa ada faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi pemerintah. Masyarakat sebagai elemen penting dalam negara tentu menjadi faktor penting dalam pemerintah memutuskan suatu kebijakan. Seperti yang dikemukakan Locke bahwa pemerintah aslinya berkewajiban melindungi masyarakat, dan mempunyai kekuasaan terbatas terhadap masyarakat. Maka dalam memutuskan suatu kebijakan tentu harus juga memperhatikan suara atau pendapat dari masyarakat (Dugis, 2018).

**b. Kepentingan Nasional (*National Interest*)**

Dalam proses pengambilan kebijakan suatu negara didasari pada kepentingan nasional dan salah satu konsep yang paling populer di kalangan penstudi hubungan internasional adalah kepentingan nasional (*National Interest*). Selama negara-negara masih menjadi aktor yang dominan dalam hubungan internasional, maka konsep kepentingan nasional masih akan menjadi konsep dasar dan penting di ilmu hubungan internasional.

Konsep kepentingan nasional sendiri menjadi pusat dalam studi Ilmu Hubungan Internasional untuk waktu yang sangat lama dan menjadi fokus untuk para penstudi ilmu hubungan internasional hingga saat ini. Kepentingan nasional merupakan perangkat eksplanatori kunci dalam memahami hubungan internasional, khususnya dalam memahami diplomasi dan politik luar negeri. Hampir tidak ada analisis tentang politik luar negeri dan diplomasi antar negeri yang tidak menyinggung faktor kepentingan nasional

ebut. Kepentingan nasional secara umum melihat bagaimana karakter tu negara dalam menjalin hubungan di dunia internasional.



Kepentingan nasional juga dapat mempengaruhi para pembuat keputusan untuk merumuskan kebijakan seperti keamanan, politik, ekonomi, maupun isu lingkungan itu sendiri. Pada umumnya, kepentingan nasional menurut Morgenthau merupakan dasar dari segala tingkah laku manusia dan negara, sehingga hal tersebut dapat dijadikan sebagai ciri. Selain itu, ada banyak lagi pendapat atau definisi mengenai kepentingan nasional, seperti Scott Burchill berpendapat bahwa kepentingan nasional merupakan motivasi dari negara dalam menjalankan kebijakan eksternal atau hubungan luar negeri.

Berdasarkan pendapat ini, maka sebagian besar orang akan menyimpulkan bahwa kepentingan nasional merupakan sesuatu hal yang bersifat mutlak atau tidak akan berubah seiring dengan berjalannya waktu. Pendapat tersebut kemudian dipertemukan dengan perkembangan definisi yang di paparkan oleh Dewi Fortuna Anwar, bahwa ada dua sudut pandang yang perlu diketahui dalam melihat arah kepentingan nasional, yakni sudut pandang objektif yang menilai bahwa kepentingan nasional sebagai sesuatu yang konstan dan tidak akan berubah sepanjang waktu dan yang kedua adalah sudut pandang subyektif yang menilai bahwa kepentingan nasional sebagai sesuatu yang ditetapkan oleh pemegang kekuasaan administrasi yang berarti akan ada kemungkinan berubah setiap waktu (Wuryandari,2008).

Selaras dengan berbagai pendapat tersebut bahwa pemerintahlah yang menjadi pemeran utama dan penting dalam memutuskan mana yang baik untuk negaranya. Mengapa demikian, Scott Burchill dalam bukunya



mengatakan pemerintah adalah agen yang menafsirkan dan mengartikulasikan kepentingan nasional. Mereka menegaskan hak berdaulat dan kekuatan monopoli. Tetapi mereka juga mengerahkan pengaruh persuasif yang sangat besar yang mencoba untuk mengecualikan klaim alternatif yang dibuat atas nama warga negara (Burchill, 2005).

Berdasarkan penjelasan di atas, Vietnam yang kita tau sebagai negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Tiongkok dan juga mempunyai sejarah yang sangat panjang mulai dari sejarah kerja sama antara kedua negara sampai dengan sengketa perbatasan. Selain itu kedua negara juga sama-sama mempunyai satu partai komunis dalam negara masing-masing yang menjadi penguasa di dalam pemerintahannya yang menjadi sangat sentral dalam memutuskan dan mengeluarkan suatu kebijakan . maka dalam penelitian ini, konsep national interest digunakan sebagai alat untuk melihat ke mana arah kebijakan pemerintah Vietnam dalam merespon hadirnya Tiongkok sebagai kekuatan yang besar di Asia Tenggara dan khususnya di negara mereka sendiri dimana disamping keuntungan akan pengaruh Tiongkok tetapi juga adanya tantangan yang membuat Vietnam menjadi dilematis.

Dalam menentukan dan memutuskan suatu kebijakan tentu akan dipengaruhi oleh berbagai faktor, maka perlu adanya kehati-hatian dengan melihat berbagai sudut pandang baik itu pandangan dari elit politik maupun pandangan dari masyarakat Vietnam itu sendiri, sehingga setiap keputusan



dapat memberikan dampak positif untuk negara sesuai dengan kepentingan nasionalnya.



Bagan kerangka konsep

## E. METODE PENELITIAN

### a. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif analitik, yang mana dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan Kebijakan Pemerintah Vietnam terhadap implementasi *belt and road initiative* Tiongkok. Penulis menganggap bahwa metode penelitian ini tepat untuk digunakan karena dapat menjembatani tersajinya hasil analisis data yang

fat kualitatif untuk mewujudkan tujuan penelitian.



#### b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik untuk mendapatkan data secara fisik untuk dianalisis dalam studi peneliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui metode Library research. Dimana data-data yang dibutuhkan dalam penelitian didapat melalui sumber, seperti buku, jurnal, dokumen, artikel, surat kabar, maupun dari media elektronik (internet).

#### c. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah teknik analisis Kualitatif-deskriptif. Teknik ini menganalisis permasalahan yang digambarkan berdasarkan pada fakta yang terjadi. Setelah itu, fakta tersebut dikaitkan dengan fakta yang lain sehingga mendapatkan tujuan yang diinginkan.

#### d. Metode Penulisan

Metode penelitian yang digunakan adalah deduktif. Adapun terdapat beberapa langkah metode ataupun langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian, yaitu merumuskan masalah, yaitu dengan mengajukan pertanyaan untuk dicari jawabannya dan mengajukan hipotesis.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kebijakan Luar Negeri (*Foreign Policy*)

Kebijakan luar negeri adalah suatu bidang yang dinamis dalam hubungan internasional (Jeffrey & Beassley, 2017). Hal ini mengkaji proses pengambilan kebijakan luar negeri yang terkait dengan peristiwa penting serta pola dalam interaksi sehari-hari setiap negara, dalam banyak hal juga, kebijakan luar negeri juga menawarkan kerangka teoritis yang membantu dari detak jantung politik global. Dimana hal ini selaras dengan berkembangnya kebijakan luar negeri sebagai varian studi hubungan internasional dan diplomasi pada pertengahan 20-an abad, dan dengan cepat mengembangkan kerangka asli untuk analisis kebijakan.

Kebijakan luar negeri juga menghubungkan studi hubungan internasional (cara negara berhubungan satu sama lain dalam politik internasional) dengan studi politik domestik (fungsi pemerintah dan hubungan antara individu, kelompok, dan institusi). Secara spesifik, teori hubungan internasional berkaitan dengan perilaku negara, yang salah satunya berfokus tentang kebijakan luar negeri. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa kebijakan luar negeri adalah strategi atau rencana tindakan untuk mencapai kepentingan nasional.

Tujuan dari kebijakan luar negeri sendiri dipengaruhi oleh sasaran yang dari masa lalu dan aspirasi untuk masa yang akan datang. Tujuan kan luar negeri dirancang, dipilih dan ditetapkan oleh pembuatan serta



dikendalikan untuk mengubah kebijakan (*revisinis policy*) atau mempertahankan kebijakan (*status quo policy*) dalam kenegaraan tertentu di lingkungan internasional (Perwita & Yani, 2005). Dalam konsep kebijakan luar negeri sendiri saat erat kaitannya dengan politik luar negeri.

Politik luar negeri pula dipahami dengan melalui dua aspek yaitu aspek eksternal dan aspek internal dari suatu negara dalam membuat kebijakan yang bertujuan untuk membangun hubungan ke dunia internasional. Dengan maksud lain, adanya kebijakan luar negeri ini akan cenderung memiliki perbedaan dengan kebijakan negara lainnya, karena negara dengan pembuat kebijakan umumnya didasarkan pada kepentingan nasional dari masing-masing negara dalam mencapai hal tersebut.

Terdapat definisi klasik dan detail mengenai kebijakan politik luar negeri yang dinyatakan oleh Walter Carlsnaes, yaitu:

Tindakan-tindakan yang diarahkan tujuan, kondisi dan aktor (baik pemerintah maupun non pemerintah) yang berada diluar wilayah teritorial mereka dan yang ingin mereka pengaruhi. Tindakan-tindakan itu diekspresikan dalam bentuk tujuan-tujuan, komitmen dan atau arah yang dinyatakan secara ekspilil, dan yang dilakukan oleh wakil-wakil pemerintah yang bertindak atas nama negara atau komunitas yang berdaulat (Eby, 2011).

Dengan demikian, kebijakan luar negeri juga dapat diartikan sebagai seperangkat rencana dan komitmen yang menjadi pedoman bagi perilaku pemerintah dalam hubungan dengan aktor-aktor lain dilingkungan eksternal (Jemadu, 2008). Pada akhirnya rencana dan komitmen tersebut diterjemahkan

am langkah-langkah dan tindakan yang nyata berupa mobilitas sumber



daya yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu efek dalam pencapaian tujuan.

Bentuk dari kebijakan luar negeri berupa sebuah keputusan yang diambil oleh pembuat kebijakan atau aktornya akan cenderung kepada kepentingan yang dianut oleh tiap negara dan berbentuk seperti indikator untuk negara tersebut. Kebijakan luar negeri ini juga dapat dilihat bentuknya dari urgensinya akan permasalahan yang ada disetiap negara pembuat. Dalam hal pembuatan kebijakan luar negeri setiap negara berbeda-beda.

Melalui kebijakan luar negeri ini dapat ditafsirkan sebagai kepentingan nasional ke dalam komunitas antar bangsa bahkan dapat meningkatkan hubungan kerjasama dan mendapat dukungan dari pihak luar dan lembaga internasional. Pengambilan keputusan kebijakan luar negeri memerlukan serangkaian proses dan melibatkan aktor yang berbeda. Hal ini tentu saja memainkan peran besar dalam urusan internasional suatu negara. Tanpa kebijakan luar negeri yang dirumuskan dengan baik, sebuah negara cenderung kehilangan posisi yang dapat menyebabkan penurunan dalam mencapai kepentingan nasionalnya.

Bahkan dalam memutuskan kebijakan luar negeri suatu negara dapat juga dipengaruhi oleh nilai, norma dan budaya yang dianut oleh suatu negara. Setiap negara memiliki perbedaan tujuan kebijakan luar negerinya. Kebijakan luar muncul sebagai suatu fenomena sosial karena setiap negara tidak dapat





memenuhi sendiri seluruh kebutuhan sosial, politik, dan ekonominya apabila hanya mengandalkan sumber daya yang terdapat di dalam teritorialnya sendiri.

Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik demi mencapai kepentingan nasional suatu negara. Kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh pemerintah suatu negara memang bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional masyarakat meskipun kepentingan nasional suatu negara tersebut akan ditentukan oleh siapa yang berkuasa pada saat itu.

Kebijakan luar negeri juga merupakan suatu kebutuhan dan kemampuan dalam negaranya yang harus dipenuhi tetapi hal tersebut berada di luar batas wilayahnya. Kepentingan nasional yang menjadi landasan utama terbentuknya suatu kebijakan luar negeri (Wuryandi, 2008). Dalam hal ini kebijakan luar negeri yang telah ditetapkan bisa saja bersifat mengancam atau bahkan membuat pihak lain bergantung pada negara yang membuat kebijakan tersebut tergantung arah dari kepentingan nasional negara tersebut dan suatu kebijakan dapat bersifat jangka panjang dan juga jangka pendek.

Menurut Rosenau, kebijakan luar negeri dapat diartikan sebagai, upaya suatu negara yang melakukan keseluruhan sikap dan aktivitasnya untuk mengatasi dan memperoleh keuntungan dari lingkungan eksternalnya.

Kebijakan luar negeri menurutnya ditujukan untuk memelihara dan mempertahankan kelangsungan hidup suatu negara (Perwita, 2005). Secara , kebijakan luar negeri merupakan suatu perangkat formula nilai, sikap,



arah, serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan dan memajukan kepentingan nasional dalam dunia internasional. kebijakan luar negeri melibatkan cita-cita, strategi, tindakan, metode, panduan, arahan, pemahaman, kesepakatan, dan sebagainya yang dengannya pemerintah nasional saling melakukan hubungan internasional dengan organisasi internasional serta aktor-aktor non-pemerintah (Jackson & Sorensen, 2013). Defenisi luar atau *foreign* dalam kebijakan luar negeri didefenisikan sebagai apapun yang berada diluar batas-batas negara tertentu sedangkan untuk istilah kebijakan atau *policy* merujuk kepada, petunjuk, pedoman pembimbing pada tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menyadari tujuan-tujuan negara yang telah dirumuskan oleh negara itu sendiri.

Kebijakan luar negeri merupakan gabungan dari tujuan yang ingin dicapai, nilai-nilai yang ditetapkan, keputusan dan aksi yang diambil oleh pemerintah sebagai perwakilan negara dalam konteks keseluruhan hubungan masyarakatnya dengan pihak luar (negara lain). Kebijakan luar negeri juga mencakup usaha-usaha untuk merancang, mengatur, dan menjaga hubungan masyarakat suatu negara dengan pihak asing.

Kebijakan luar negeri menurut Webber dan Smith, dapat berubah mengikuti beberapa kondisi. *Pertama*, perubahan dalam jumlah, sumber daya, dan status dari aktor negara dan non-negara. *Kedua*, perubahan dalam hakikat nan nasional serta nilai-nilai dan tujuan-tujuan nasional lain. *Ketiga*, perubahan dalam proses pembuatan kebijakan, termasuk adanya proses koordinasi kebijakan lintas departemen dan lintas negara. *Keempat*, perubahan



hakekat dari *power* (Webber & Smith, 2002). Kebijakan luar negeri juga merupakan perpaduan antara faktor internal dan faktor eksternal dari sebuah negara, faktor internal ialah segala urusan domestik suatu negara yang sangat erat kaitannya dengan pos-pos strategis seperti ekonomi, politik, dan lain sebagainya.

Tidak hanya itu, pengaruh dari profil pemimpin, partai politik, hingga media massa adalah faktor internal lainnya yang memainkan peran penting dalam pembentukan atau perumusan suatu kebijakan luar negeri. Sementara untuk faktor eksternal bertaitan erat dengan sikap maupun respon dari berbagai negara sasaran dari kebijakan luar negeri itu sendiri. Secara rasional, setiap pemerintah akan mengidentifikasi tujuan mereka dan kemudian mengolah cara-cara mencapainya melalui aksi politik atau kebijakan luar negerinya.

Tujuan jangka Panjang adalah untuk memenuhi paling tidak satu dari sejumlah nilai-nilai tertentu yang bersumber dari kebutuhan domestik. Nilai-nilai itu merupakan keseluruhan dari nilai-nilai sosial, ekonomi, maupun simbolis, bahkan sikap dan persepsi dalam negeri yang telah terbentuk oleh perkembangan sejarah, ideologi, dan asumsi mengenai hidup yang ideal. Studi mengenai kebijakan luar negeri kemudian akan dikembangkan lagi oleh Marijke Breuning.

Dia menjelaskan bahwa terdapat tiga hal yang ingin dia jelaskan oleh studi ap kebijakan luar negeri, yaitu *decision*, *behavior*, dan *outcome*. Untuk *n* sendiri adalah pilihan yang diambil oleh seorang pemimpin atau



pembuat keputusan dari beberapa opsi kebijakan yang sudah ada. *Behavior* adalah upaya-upaya yang dilaksanakan oleh negara terkait dengan keputusan yang telah diambil dan upaya untuk mempengaruhi negara lain demi pemenuhan kepentingan nasional yang saling bersangkutan. Sementara untuk *outcome* adalah hasil final yang tidak hanya bergantung pada negara sendiri, namun juga bergantung pada reaksi negara lain.

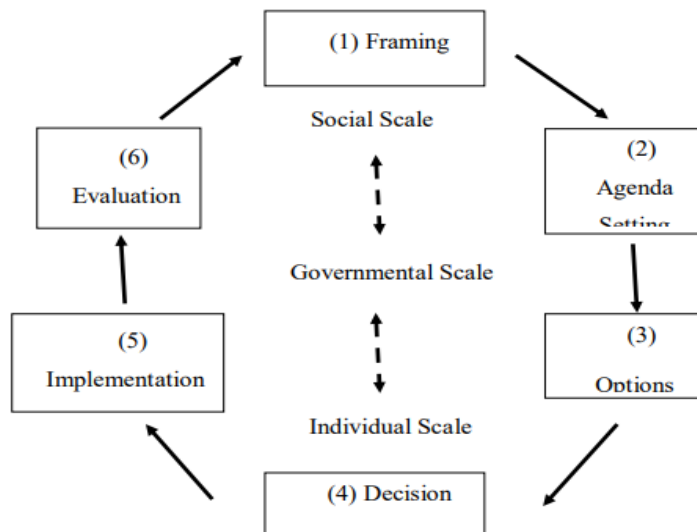
Sementara itu dalam buku *Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction* memperkenalkan ada tiga analisis yang dapat digunakan dalam studi kebijakan luar negeri yang saling berkaitan yaitu *Individual level of analysis*, *State level of analysis*, dan *Sistem level of analysis* (Breuning, 2007),

1. *Individual level of analysis* : analisis pada level ini berfokus kepada individu atau sekelompok individu yang berlaku sebagai pengambil kebijakan luar negeri. Analisis yang digunakan dalam level ini ada dua hal, yaitu pertama menyangkut kepribadian yang meliputi kepribadian yang meliputi kepercayaan dan nilai-nilai yang dipegang pemimpin tersebut, dan yang kedua adalah persepsi yakni cara pemimpin tersebut melihat situasi dan mempertimbangkan kebijakan yang akan diambil dari pembacaan situasi.
2. *State level of analysis*, analisis pada level ini berfokus kepada kondisi-kondisi di dalam negara tersebut yang mempengaruhi pengambilan keputusan dan perilaku negara dalam menjalankan hubungan luar negeri dengan negara lain.



3. *Sistem level of analysis*, analisis pada tingkat ini berkaitan dengan komparasi dan interaksi antar negara, terutama terkait dengan *relative power* yang dimiliki oleh negara-negara yang berinteraksi. Analisis pada level ini jauh lebih mendalam dari dua tingkatan sebelumnya.

Bagan 2.1 Skema Perumusan Kebijakan Luar Negeri



Sumber: (Busby, 2007)

Dari bagan yang terlihat di atas, ada skema perumusan kebijakan luar negeri suatu negara. Skema ini merupakan gambaran besar kompleksitas dalam proses perumusan kebijakan luar negeri. Diagram berjalan dari tingkat sosial ke tingkat pemerintah, kemudian ke tingkat individu, dan kembali ke tingkat pemerintah, sebelum kembali ke tingkat sosial. Menurut siklus skematik ini, framing adalah tahap pertama dalam merumuskan kebijakan luar negeri.



Pada tahap ini, framing merupakan fase dimana proses identifikasi masalah dikelompokkan ke dalam bidang tertentu dari sekian banyak masalah

yang ditangani oleh suatu negara kemudian diproses lebih lanjut untuk menciptakan kebijakan yang efektif dan efisien . Agar suatu masalah dapat dibingkai sebagai masalah politik dan bergeser dari dunia objektivitas ke dunia intersubjektivitas, pertama-tama harus dibentuk oleh satu atau lebih "pengusaha kebijakan". Terakhir membuat sesuatu yang dapat dipahami dengan memberinya kerangka kerja-dengan kata lain, mereka menamai, menafsirkan, dan menyederhanakannya. Cara masalah didefinisikan akan mengarahkan istilah-istilah perdebatan dan menentukan aktor mana yang dipanggil. Akibatnya, aktor-aktor yang menetapkan kerangka kerja untuk debat memiliki pengaruh yang cukup besar, bahkan ketika mereka tidak memiliki akses langsung ke pembuat keputusan publik untuk masalah yang akan dibingkai sebagai masalah politik dan bergeser dari dunia objektivitas ke salah satu intersubjektivitas (Busby, 2007).

Selanjutnya tahap kedua dalam siklus adalah pengaturan agenda. Di sini, kapasitas aktor non-negara untuk memobilisasi dan meyakinkan orang-orang kunci, seperti pegawai negeri dan penasihat politik, yang mengontrol akses ke para pemimpin, memainkan peran utama. Dalam hal ini, pemerintah atau pemimpin politik perlu mengklarifikasi suatu masalah dari berbagai elemen dalam masyarakat sehingga objektivitas suatu masalah atau orientasi kepentingan suatu negara dapat diidentifikasi (Paquin, 2018).



Kerangka kerja dan peluang politik sangat menentukan otoritas politik dipanggil untuk memeriksa berbagai opsi kebijakan, yang merupakan tahap dari siklus. Dalam semua kasus, ketika suatu administrasi mengambil

suatu masalah, diskusi menjadi lebih teknis dan posisinya lebih moderat. Para ahli, termasuk pegawai negeri, penasihat, dan ilmuwan, secara bertahap menggantikan aktivis, reporter, atau pelobi yang awalnya membingkai masalah ini. Dengan ini, gambaran besar metode pemecahan masalah dapat diidentifikasi dengan cermat, baik secara substansial maupun operasional. Pada tahap keempat, pengambil keputusan diminta untuk memberikan pendapat tentang sejumlah opsi terbatas.

Akibatnya, keputusan mereka secara luas disusun oleh tahap-tahap sebelumnya. Unit pengambilan keputusan sangat bervariasi di berbagai negara dan untuk masalah yang berbeda. Bagian penting dari penelitian FPA secara khusus melibatkan penentuan unit pengambilan keputusan dan mengidentifikasi karakteristik khususnya (Hermann, 2001). Oleh karena itu, proses perumusan kebijakan luar negeri memiliki proses yang panjang dan detail karena mencakup berbagai aspek.

Proses perumusan kebijakan luar negeri tidak berhenti pada tahap pengambilan keputusan. Aspek lain mempengaruhi dan berkontribusi besar terhadap perumusan kebijakan luar negeri, salah satunya adalah administrasi publik. Hal ini didasarkan pada banyaknya penyesuaian yang diperlukan seperti cara menafsirkan, menerapkan, dan menyesuaikannya secara eksternal. Namun, pada tahap kelima siklus ini, administrasi tidak selalu memiliki kapasitas, informasi, legitimasi atau bahkan kemauan untuk memastikan bahwa saran pihak berwenang diterjemahkan dengan sempurna ke dalam hasil nyata. Kendala-kendala ini sangat nyata dalam politik dalam negeri dan seakan



diperparah ketika suatu kebijakan dilaksanakan di luar batas negara (Paquin, 2018).

Menurut pendapat Hill, "kebijakan luar negeri adalah engsel politik domestik dan internasional". Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam perumusan kebijakan luar negeri, ada dua faktor penentu yang mempengaruhinya, yaitu internal atau domestik dan eksternal atau internasional. Sebab, kedua ruang lingkup faktor-faktor tersebut saling mempengaruhi dalam merumuskan kebijakan luar negeri. Sementara yang lain berpendapat bahwa politik dalam negeri dan kebijakan luar negeri adalah dua arena isu 'independen', yang lain berpandangan bahwa kebijakan luar negeri dan politik dalam negeri 'saling bergantung' dan dapat saling menumpahkan.

Tidak diragukan lagi, lingkungan internasional memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan luar negeri setiap negara. Selain itu, beberapa faktor eksternal utama menentukan kebijakan luar negeri suatu negara: sistem atau struktur kekuasaan internasional (Sefriani, 2016), hukum internasional, organisasi internasional, aliansi, dan kekuatan militer atau perlombaan senjata.

## **B. Kepentingan Nasional (*National Interest*)**

Istilah negara berasal dari terjemahan Bahasa asing sebagai berikut, *staat* Bahasa Belanda yang artinya negara; *state* Bahasa Inggris yang artinya negara; *E'tat* Bahasa France artinya Negara. Kata-kata (*state & e'tat*) tersebut

berasal dari Bahasa latin yaitu status *statum* artinya menaruh keadaan dalam keadaan berdiri, membuat berdiri, dan menempatkan (Satriawan & Khoiriah,





2016). Sedangkan secara terminologi, negara dapat diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam satu kawasan dan mempunyai administrasi yang berdaulat (Ubaedillah & Rozak, 2012).

Sebagai konsep yang mengimplementasikan kehidupan bermasyarakat, negara tentu memiliki banyak definisi, sejumlah pakar memperdebatkan istilah negara sesuai dengan konteks zaman yang dihadapinya dari zaman klasik hingga zaman modern. Negara adalah insititusi yang dibentuk oleh kumpulan orang-orang yang hidup dalam wilayah tertentu dengan tujuan sama yang terikat dan taat terhadap perundang-undangan serta memiliki administrasi sendiri.

Negara dibentuk atas dasar kesepakatan bersama yang bertujuan untuk mengatur kehidupan anggotanya dalam memperoleh hidup dan memenuhi kebutuhan mereka. Untuk mengatur bagaimana anggota masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya sebagai warga negara, negara perlu memberikan batasan-batasan dalam wujud aturan & hukuman dimana setiap negara tentu memiliki bentuk-bentuk nya sendiri.

Dalam hubungan internasional negara merupakan salah satu aktor yang memiliki peran sentrum dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara. Demikian hal tersebut akan dilandasi dengan kepentingan nasional negara but. Menurut Morgenthau, dalam buku Study Strategis dalam transformasi



sistem Internasional Pasca Perang dingin yang di tuliskan oleh T. May Rudy ( Rudy, 2002), dia mengatakan bahwa :

Kepentingan nasional adalah kemampuan minimum negara untuk melindungi, dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultur dari gangguan negara lain. Dari tinjauan ini para pemimpin negara menurunkan kebijakan spesifik terhadap negara lain yang sifatnya kerjasama atau konflik.

Kepentingan Nasional sendiri adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan kebutuhan bangsa/negara atau sehubungan dengan hal yang dicita-citakan. Dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif tetap dan sama diantara semua negara/bangsa mempunyai manifestasi seperti keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayah) serta kesejahteraan. Kedua hal pokok ini yaitu keamanan (*Security*) dari kesejahteraan (*Prosperity*).

Kepentingan nasional juga diidentikkan dengan “tujuan nasional”. Contohnya kepentingan pembangunan ekonomi, kepentingan pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) atau kepentingan untuk mengundang investasi asing dengan rencana untuk mempercepat laju industrialisasi, hal tersebut tentu demi terwujudkannya cita-cita dan harapan dari satu negara. Kepentingan nasional setiap negara juga dapat diterjemahkan sebagai tujuan-tujuan yang telah diatur sedemikian rupa hingga benar-benar sesuai dan secara adil mengakomodasi semua orang, dengan kata lain kepentingan nasional sebuah negara merupakan cerminan keinginan dari

atnya.



Secara umum adanya tujuan negara merupakan landasan dasar baginya untuk terbentuk, baik tujuannya bersifat baik maupun buruk. Tujuan negara pun bersifat abstrak dan idiil (ideologi dasar suatu negara yang memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat bagi lembaga pemerintah maupun masyarakat di negara tersebut) mengenai sesuatu yang ingin diwujudkan olehnya. Oleh karena itu, negara dengan fungsi sebagai pedoman dan arahan untuk menjalankan kekuasaan negara perlu mengarahkan pelaksanaan kekuasaannya pada keterwujudan dari tujuan negara itu sendiri.

Dalam mewujudkan hal tersebut, maka negara perlu untuk merealisasikan hal tersebut melalui kebijakan nasional yang tentu saja harus berlandaskan kepentingan nasional negara itu. Adapun salah satu aspek penting yang dapat dijadikan sebagai kepentingan nasional adalah permasalahan atau isu mengenai lingkungan.

Dalam hubungan internasional, kepentingan nasional secara konseptual digunakan untuk menjelaskan bagaimana perilaku politik luar negeri dari suatu negara. Dimana sebuah negeri bersifat “*single minded*” artinya dalam suatu negara memiliki keterbatasan maka dari itu keinginan untuk menjalin relasi dan eksistensi di dunia internasional yang perlu diperhatikan dan dipertahankan (Jemadu, 2008). Kalimat yang diucapkan oleh Hans J. Morgenthau yang berbunyi “...*One standard for thought, one rule for action: The National*

*est...* yang menjadi satu kesepakatan yang mampu bertahan sejak konflik di dunia hingga saat ini, yaitu kesepakatan bahwa segala sesuatu yang



menjadi latar belakang manusia hingga suatu negara dalam bertingkah laku tidak lain demi mencapai kepentingan masing-masing.

Keterikatan akan keberlangsungan hidup terhadap upaya yang dilakukan untuk mencapai kepentingan tersebut membuat banyak orang yang semakin mendekatkan dirinya untuk mengenal dan memahami arti penting kata kepentingan nasional dari sebuah negara. Idealnya kepentingan nasional terangkum sebagai suatu pedoman yang meliputi seluruh kebutuhan warga negara yang menjadi kebutuhan negara.

Kepentingan nasional suatu negara menjadi suatu cerminan tentang bagaimana negara tersebut atau kepentingan nasional bisa menjadi suatu ciri dari suatu negara yang secara alaminya akan mempengaruhi interaksi yang terbangun antar satu negara dengan negara lainnya. Karena itu, kepentingan nasional bisa dipandang sebagai satu pedoman yang akan terus mengalami dinamika setiap waktu mengikuti arah perkembangan kebutuhan manusia.

Melihat bahwa kepentingan nasional akan terus merujuk pada kebutuhan warga negara, ternyata tidak sepenuhnya menyepakati hal tersebut, dimana beberapa pendapat para ahli peneliti ataupun pelaku politik menyatakan bahwa kekuasaan membuat para pemegang kekuasaan menafsirkan berbeda tentang kepentingan nasional yang dipahami sebagai kepentingan bersama.

Seperti yang dipaparkan oleh Dewi Fortuna Anwar yang menyatakan bahwa pandangan terhadap kepentingan nasional bisa dibagi menjadi dua sudut pandang yaitu sudut pandang objektif dan subyektif (Wuryandi, 2008).



Pandangan objektif mengartikan bahwa segala keputusan untuk menetapkan suatu kepentingan nasional akan bersifat konstan untuk menetapkan suatu kepentingan tersebut tidak akan berubah setiap tahunnya, sedangkan melalui pandangan subyektif menafsirkan bahwa segala keputusan yang ditetapkan langsung oleh para pemegang kekuasaan diartikan sebagai kepentingan nasional.

Hal ini berarti bahwa kepentingan nasional dapat berubah mengikuti pandangan pemilik pemangku kekuasaan. Kepentingan nasional dapat dijadikan sebagai alat ukur dalam perumusan kebijakan yang akan dibuat oleh suatu negara. Kepentingan nasional atau merupakan suatu kepentingan yang dirancang satu negara dalam mencapai tujuan dari negara tersebut.

Kepentingan nasional dapat dicapai dengan berbagai cara, seperti melalui ekonomi, politik, arah kebijakan, bahkan budaya (Morgenthau, 2006). Konsep ini menerangkan bahwa dalam menentukan sebuah kepentingan nasional maka yang harus dilihat adalah kekuatan dari negara tersebut sebab konsep ini percaya bahwa kekuatan akan memiliki dampak yang signifikan terhadap tercapainya kepentingan negara. Kapabilitas negara ini kemudian dapat dilihat dari seberapa kuat ketahanan nasional suatu negara.

Ketahanan nasional sendiri merupakan kumpulan dari aspek-aspek lainnya, seperti landasan ideologi, politik, kondisi ekonomi, kehidupan sosial-ya, dan juga keamanan-pertahanan. Kapabilitas negara juga dapat dilihat bagaimana negara ini berhubungan dengan negara lain. Lanjut



Morgenthau membagi kepentingan nasional ini menjadi dua tingkat, yakni kepentingan primer dan sekunder.

Kepentingan nasional primer menyangkut perlindungan identitas fisik, politik dan budaya, serta keamanan dan kelangsungan hidup dari suatu bangsa, sedangkan kepentingan nasional yang bersifat sekunder adalah segala kepentingan dari suatu negara yang masih dapat dikompromikan atau diupayakan melalui negosiasi dengan negara lain.

Michael Roskin selain mengklasifikasi kepentingan nasional dalam kepentingan vital dan sekunder, ia juga membedakannya kedalam kepentingan permanen dan kontemporer, kepentingan general dan spesifik, serta kepentingan bersifat *conflicting* dan komplementer (Bakry,2017). Kepentingan vital diantaranya adalah mempertahankan integritas territorial sedangkan untuk sekunder adalah hal yang menyangkut perlindungan warga negara diluar negeri. Kepentingan permanen adalah kepentingan yang bersifat relative tidak akan berubah dalam waktu yang lama dan kepentingan kontemporer adalah kepentingan yang hanya ingin dicapai suatu negara pada periode waktu yang tertentu.

Kepentingan general adalah kepentingan suatu negara yang ingin diaplikasikan dalam wilayah geografis yang luas dan kepentingan spesifik merupakan kepentingan dengan cakupan wilayah dan isunya isu relatif tas. Sementara untuk *conflicting* dan komplementer adalah kepentingan negara yang menimbulkan konflik dengan negara lain dan komplementar



justru merupakan kepentingan yang saling melengkapi kepentingan nasional negara lain.

Pandangan lain juga yang dikemukakan oleh Miroslav Nincic dimana ia mencoba menetapkan kriteria untuk menetapkan sesuatu hal bahwa kepentingan nasional memiliki tiga hal, yaitu (Jemandu, 2008) :

1. Kepentingan itu harus bersifat vital sehingga pencapaiannya menjadi prioritas utama pemerintah dan masyarakat.
2. Kepentingan tersebut harus berkaitan dengan lingkungan internasional, dengan maksud kepentingan nasional dipengaruhi oleh lingkungan internasional.
3. Kepentingan nasional harus melampaui kepentingan yang bersifat partikularistik dari individu, kelompok, atau lembaga sehingga menjadi kepedulian masyarakat secara keseluruhan.

Kepentingan nasional merupakan suatu hal yang abstrak yang masih menemui perdebatan dalam menentukan batasan pengertiannya. Namun, perbedaan segala pendapat dan pandangan tersebut sebenarnya menjadi satu dasar dimana menyepakati bahwa kepentingan nasional merupakan landasan utama suatu negara bergerak yang dirumuskan oleh para pemerintah sebagai hasil pemetaan kebutuhan masyarakat di negara tersebut.



Sedangkan menurut Donald E. Nuechterlein dalam *National Interests Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision-making*, kepentingan nasional adalah kebutuhan dan keinginan yang dirasakan

oleh suatu negara berdaulat dalam hubungannya dengan negara-negara berdaulat lainnya yang terdiri dari lingkungan eksternal (Donald, 2009). Dalam melihat arah kebijakan suatu negara, kepentingan nasional menjadi salah satu hal yang sangat diperhatikan. Seperti dalam teori realisme klasik, yang berpandangan bahwa kepentingan nasional merupakan petunjuk dasar bagi suatu negara untuk melihat arah kebijakan luar negerinya.

Sebagaimana yang diketahui, realisme percaya bahwa keadaan dunia internasional bersifat konfliktual, dan dari keadaan ini maka negara akan berupaya untuk bertahan salah satu caranya adalah dengan mempertahankan dan memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Kepentingan nasional dapat diartikan sebagai tujuan yang harus dicapai oleh setiap negara dalam melaksanakan politik luar negerinya.

Kepentingan nasional merupakan hasil kompromi politik antara berbagai pihak dalam suatu negara yang berbeda kepentingannya. Kepentingan nasional biasanya terdapat dalam konstitusi negara sehingga harus diperjuangkan oleh setiap entitas yang ada di negara tersebut. Kepentingan nasional juga merupakan kemampuan minimum negara bangsa dalam melindungi identitas fisik (wilayah, tanah, teritorial), identitas politik (rezim ekonomi politik), dan identitas kulturalnya (norma etnis, linguistik, sejarah) dari gangguan negara bangsa lain.



Kepentingan nasional sering dijadikan tolak ukur atau kriteria pokok para pengambil keputusan (*decision makers*) masing-masing negara



sebelum merumuskan dan menetapkan sikap atau tindakan. Bahkan setiap langkah kebijakan luar negeri (*Foreign Policy*) perlu dilandaskan kepada kepentingan nasional dan diarahkan untuk mencapai serta melindungi apa yang dikategorikan atau ditetapkan sebagai “Kepentingan Nasional”.

Pada hakekatnya kepentingan nasional mempunyai ciri *outward looking*, dimana suatu negara memposisikan dirinya, mencapai tujuan-tujuannya, mempertahankan eksistensinya, membela hak-haknya serta melaksanakan kewajibannya dalam hubungan dengan negara lain. Oleh karena itu kebijaksanaan politik luar negeri menjadi faktor utama kegiatan untuk mencapai kepentingan nasional (Willy, 2020). Dalam hirarki pengambilan keputusan dalam suatu negara, kepentingan nasional menduduki tempat tertinggi dimana strategi maupun kebijaksanaan-kebijaksanaan lainnya yang lebih rendah haruslah mengacu kepadanya.

Kepentingan nasional menjadi bingkai ruang lingkup penentuan kebijaksanaan sekaligus memberikan arah dan pegangan bagi penyelenggara negara. Dengan kata lain, tanpa adanya kepentingan nasional maka sebenarnya mustahil ada strategi pembangunan bidang-bidang lain yang mencakup seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.



### C. Penelitian Terkait

Penelitian ini merupakan penelitian yang menganalisis bagaimana kebijakan pemerintah Vietnam Terhadap implementasi Belt And Road Initiative Tiongkok Di Asia Tenggara melalui konsep national interest dan foreign policy. Terdapat beberapa penelitian mengenai topik yang serupa dengan penelitian penulis. Adapun beberapa penelitian yang mengambil topik serupa dan menjadi acuan perbandingan yang diteliti oleh penulis dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu:

Penelitian pertama yang berjudul *Peran kebijakan One Belt One Road (OBOR) Initiative dalam meredam ketegangan sengketa laut Tiongkok selatan antara Tiongkok dan Vietnam tahun 2017-2021* Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana peran kebijakan inisiatif OBOR dapat meredam konflik yang berkepanjangan antara Tiongkok dan Vietnam terkait sengketa Laut Tiongkok Selatan. Kebijakan inisiatif OBOR merupakan bentuk kerjasama yang dibentuk oleh Tiongkok yang bertujuan untuk menghubungkan perekonomian 3 benua dengan mempromosikan berbagai program ekonomi lainnya.

Penelitian kedua yang berjudul *pengaruh Kebijakan Belt And Road Initiative Tiongkok terhadap stabilitas sub-kompleks keamanan Asia Tenggara* Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan Belt and Road Initiative Tiongkok terhadap stabilitas sub-kompleks keamanan kawasan Asia

gara. Sebagai alat analisis, penulis menggunakan teori regional security complex yang difokuskan pada variabel social construction. Hasilnya



ditemukan bahwa Tiongkok menggunakan BRI sebagai alat desekuritisasi yang memengaruhi dinamika konstruksi sosial di kawasan. Dengan memanfaatkan kerja sama ekonomi dan pembangunan, Tiongkok berupaya menghilangkan persepsi ancaman (sekuritisasi) dengan membentuk citra kooperatif terhadap negara-negara Asia Tenggara. Perbaikan citra Tiongkok terlihat dari adanya perubahan pola aliansi di kawasan, di mana negara-negara yang sebelumnya dekat dengan Amerika Serikat kini mulai menunjukkan tendensinya terhadap Beijing. Bahkan, Thailand dan Filipina yang merupakan sekutu terdekat Washington di kawasan juga memperlihatkan kecenderungan serupa.

Penelitian ketiga yang berjudul *PENGARUH BELT AND ROAD INITIATIVE (BRI) TERHADAP KERJASAMA EKONOMI TIONGKOK DAN VIETNAM PERIODE 2015-2018* . Skripsi ini menganalisis pengaruh BRI terhadap kerjasama ekonomi Tiongkok dan Vietnam periode 2015-2018. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh BRI terhadap kerjasama ekonomi Tiongkok terhadap kerjasama ekonomi Tiongkok dan Vietnam. Skripsi tersebut menggunakan kerangka pemikiran kerjasama internasional, interdependensi dan diplomasi ekonomi.

